



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/69/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa guna mendukung dan lebih meningkatkan kinerja Tim Pelayanan Administrasi dan Kependudukan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 agar lebih memperoleh hasil yang maksimal, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Tim Pelayanan Administrasi dan Kependudukan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 18/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86);
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/54/KEP/413.013/2020 tentang Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan segala biaya untuk keperluan sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 2.06.01.5.1.1.02.001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSYANTO
NIP. 1980114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/69/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

RINCIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Honor/Bulan (Rp)	Ket.
1	3	2	4	5
I	Pengarah	Fadeli, S.H., M.M.	2.500.000,00	12 Bulan
II	Ketua	Dr.Yuhronur Efendi, M.B.A.	2.250.000,00	12 Bulan
	Wakil Ketua	Sugeng Widodo, S.Sos, M.M.	2.000.000,00	12 Bulan
III	Sekretaris	Abdul Hadi, S.E., M.M.	1.800.000,00	12 Bulan
IV	Koordinator	1. Dra. Rochani, M.M.	1.550.000,00	12 Bulan
		2. Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.M.	1.550.000,00	12 Bulan
		3. Emi Handayani, S.H., M.M.	1.550.000,00	12 Bulan
		4. Akhmat Zainuril, S.H., M.M.	1.550.000,00	12 Bulan
V	Tim Pengendali Teknis	1. Drs. Moh. Nalikan, M.M.	1.000.000,00	12 Bulan
		2. Dra. Sulastri, M.Si.	1.000.000,00	12 Bulan
		3. Nurul Mukminin, S.E., M.M.	1.000.000,00	12 Bulan
		4. Sutri'ah, S.Sos.	1.000.000,00	12 Bulan
		5. Hota Sriwarastuti, S.E., M.M.	1.000.000,00	12 Bulan
		6. Elma Karunia Agustya, S.E.	1.000.000,00	12 Bulan
		7. Yohan Saksono, S.E.	1.000.000,00	12 Bulan
		8. Adi Supatmo, S.H.	1.000.000,00	12 Bulan
		9. Andi Hartanto, S.E., M.M.	1.000.000,00	12 Bulan
		10. Retno Dessy Sari Wulan, S.E.	1.000.000,00	12 Bulan
		11. Eri Setiawan, S.Kom.	1.000.000,00	12 Bulan
		12. M. Bahrul Ulum, S.T.	1.000.000,00	12 Bulan
		13. Umi Hanik, S.E., M.M.	1.000.000,00	12 Bulan
		14. Moch. Hary Purnomo, S.E.	1.000.000,00	12 Bulan
		15. Wiwin Lestari, S.E., M.M.	1.000.000,00	12 Bulan
		16. Ery Samsul Rosidi, S.E.	1.000.000,00	12 Bulan
		17. Erma Nur Mawayanti, S.H.	1.000.000,00	12 Bulan
		18. Hariyanto C. Nugroho, S.Kom.	1.000.000,00	12 Bulan
VI	Anggota	1. Saiful Bahri, S.H.	750.000,00	12 Bulan
		2. Sumari	750.000,00	12 Bulan
		3. Rohmatul Latifah	750.000,00	12 Bulan
		4. Yuni Purwanti	750.000,00	12 Bulan
		5. Abdul Manan	750.000,00	12 Bulan
		6. Moch. Ainur Rofiq Suvi, S.E.	750.000,00	12 Bulan
		7. Kasiono	750.000,00	12 Bulan
		8. Wawan Sundoro Eko P.S.	750.000,00	12 Bulan
		9. Samudi	750.000,00	12 Bulan
		10. Erna Wahyudi	750.000,00	12 Bulan
		11. Achmad Basir Abdullah, A.Md.	750.000,00	12 Bulan
		12. Dwi Lestari Ningsih, A.Md.	750.000,00	12 Bulan
		13. Rima, S.Kom.	700.000,00	12 Bulan
		14. Rima Maya Mashita, S.Kom.	700.000,00	12 Bulan
		15. Jayanti Arum Suryono, S.A.	700.000,00	12 Bulan
		16. Andika Tri Kusuma Wardani, S.T.	700.000,00	12 Bulan
		17. Marya Prafitra Sanjaya, S.Ikom.	700.000,00	12 Bulan

1	2	3	4	5
		18. Dikif Mekysiam	700.000,00	12 Bulan
		19. M. Rizal Ardiansyah, S.M.	700.000,00	12 Bulan
		20. M. Faris Syahrizal, S.Ak.	700.000,00	12 Bulan
		21. Ayu Dela Nur Rahmawati, S.A.P.	700.000,00	12 Bulan
		22. Rizal Pratama Putra	700.000,00	12 Bulan
		23. Agus Subandi	700.000,00	12 Bulan
		24. Dwi Rahmayani Fauzia, S.M.	700.000,00	12 Bulan
		25. Ainul Mufidah, S.Pd.	700.000,00	12 Bulan
		26. Adisurya Widiyatno	700.000,00	12 Bulan
		27. Soni Tanela, S.Pd.	700.000,00	12 Bulan
		28. Mudzilatul Nisa, S.E.	700.000,00	12 Bulan
		29. Ahmad Syahid, S.Kom.	700.000,00	12 Bulan
		30. Rizqi Ayu Fauziah, S.E.	700.000,00	12 Bulan
		31. Fandi Aprilianto P, S.Kom.	700.000,00	12 Bulan
		32. Aminun, S.E.	700.000,00	12 Bulan
		33. Moh. Syaifur Rijal, S.Pd.I.	700.000,00	12 Bulan
		34. M. Syarifudin Arbak, S.H.	700.000,00	12 Bulan
		35. Siska Arifah Desy Afrianti, S.M.	700.000,00	12 Bulan
		36. Rovicy Kurnia Nurmansyah, S.Pd.	700.000,00	12 Bulan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Sampul dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
JOKO NURSIYANTO
NIP. 1980114 198801 1 001